

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Amirrudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram.

Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Jimly, Ashiddiqie, 2010, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.

_____, 2007 *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu Populer.

Khairul Fahmi (Editor), 2016, "*Pengisian Jabatan Publik dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif*", Jakarta, Rajawali Pers.

Moh.Kusnardi, Harmaily Ibrahim, 1985, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, CV "Sinar Bakti".

M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Ni'matul Huda, 2007, *Hukum Tata Negara Indoensia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD.

PUTUSAN Mahkamah Kontitusi Nomor 22/PUU-XIII/2015.

C. Jurnal

Fathudin, "*Pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Pejabat Publik*", Tesis PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok : 2016.

Jurnal Konstitusi, Feri Amsari, *Presidensialisme dan Lembaga Kepresidenan*, PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi (Volume II No. 1, September 2013).

Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015, Arie Elcaputera, Hak Prerogatif Presiden Dalam Mengangkat KAPOLRI Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, Paper, Seminar
Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan
Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan
Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Ri Denpasar, 14-18
Juli 2003.

D. Sumber Lain

Jimly Asshiddiqie, “Kedudukan Konstitusional Kepolisian dalam Tata-
Pemerintahan Negara” Makalah diunduh pada 6 Desember 2015 Pukul
03.00 WIB di <http://www.jimly.com/makalah/namafile/180/Kepolisian>.

Moh. Mahfud MD. 2014. “*MPR dalam Sistem Presdensiil*”, pada Seminar
yang diselenggarakan dalam Kerjasama antara Kesekjenan
MPR-RI dan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)
Universitas Andalas, Padang.

Suharizal, 2014. bahan ajar, “*Lembaga Kepresidenan Menurut UUD
1945*”, Padang.

E. Website

http://nationalparalegal.edu/conlawcrimproc_public/federalism/Presidential_powers.asp.

<https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php>.

<http://ppid.kompolnas.go.id/profile/profil-lembaga/>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>.

<https://nasional.tempo.co/read/780620/mapol-gugat-presiden-tunjuk-tito-karnavian-sebagai-kapolri>.

